

## Menakar Eksistensi Negara Multi Etnik Modern

Achmad Zainuri\*

*Abstract : The failure of politics and political study to contribute the appropriate format impacts any terribles in life. Any conflicts, violences, and even war are recognized as the failure of politics. There for the growth of true political systems is to reform the political life.*

Kata Kunci : Etnik, Etnisitas, dan Multi Etnik

**ABSTRAK** di atas merupakan penggalan pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri ketika menerima gelar Doktor *Honoris Causa* bidang Ilmu Politik di Universitas Moscow, Rusia pada 22 April 2003. Pidato yang berjudul *Menuju Suatu Negara Multi-Etnik Modern yang Lebih Adil dan Sejahtera* itu menyajikan refleksi pemikiran yang bernas tentang proses pendirian dan pengelolaan negara plural seperti Indonesia ini. Artikel ini bermaksud memberi catatan kritis dan apresiatif terhadap pidato yang me-narik tersebut. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk. Berbeda dengan kemajemukan etnik yang terdapat di negara-negara benua Eropa, Asia, atau Afrika, kemajemukan etnik di negara kepulauan Indonesia terbilang unik dan hampir tidak ada padanannya di dunia. Bangsa Indonesia dihuni sekitar 200 juta jiwa, terdiri atas 525 etnik,<sup>1</sup> mendiami 17.508 buah pulau, berbicara dalam ratusan dialek dan menganut lima agama besar du-nia, memilih bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensiil. Bangsa-bangsa lain dengan ukuran dan kompleksitas yang (hampir) sama lazimnya memilih bentuk negara federasi untuk menjamin persatuan dan

---

\*Penulis adalah dosen Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Alumni Kursus Singkat Angkatan XI Lemhanas RI Tahun 2003.

kesatuan nasional sambil memenuhi aspirasi dan kepentingan rakyatnya yang mejemuk itu.<sup>2</sup>

Dan, kondisi ini jugalah yang kemudian menjadikan persoalan etnis di Indonesia akan selalu menghadapi masalah besar. Hal ini bisa dibaca dari terkon-disikan dan terisolasinya wilayah etnik di pulau-pulau atau di daratan yang secara fisik dipisah-pisah oleh pegunungan, sungai, danau, dan laut. Isolasi fisik ini mempengaruhi sikap sosial dan menjadi faktor utama dari isolasi mental, yang pada gilirannya dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Sebab, di saat semangat kebangsaan digemakan, semangat kesukuan<sup>3</sup> acapkali muncul mematahkan semangat kebangsaan itu.

Baik dari segi kultur politik maupun secara geopolitik, masalah kemajemukan dan perbedaan etnik dan etnisitas tersebut menjadi faktor konstan dalam kehidupan politik Indonesia yang tidak dapat diabaikan oleh kekuatan sosial politik atau oleh pemerintah sekalipun. Karena itu, pada tahun 1951, dalam usaha membuat lambang negara yang mampu menunjukkan esensi bangsa dan negara, dipilihlah sebuah sesanti yang berasal dari masa lalu Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Pemilihan sesanti ini tak lain untuk meng-cover gejolak etnisitas dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Terkait kemajemukan bangsa Indonesia, Presiden Megawati dalam pidatonya menyatakan:

Khusus bagi bangsa yang bermasyarakat majemuk seperti bangsa Indonesia, di mana terdapat lebih dari 300 etnik yang berbeda-beda ras, agama, adat, tradisi, serta kebudayaannya, masalah politik dan ilmu politik ini bukan saja penting, tetapi juga teramat vital. Keberhasilan atau kegagalan politik serta ilmu politik dalam menangani kemajemukan masyarakat Indonesia, bukan saja akan menyebabkan berkepanjangan konflik horisontal antara sesama warga masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan semakin maraknya kekecewaan rakyat, yang jika tidak ditangani dengan baik, arif, serta bijaksana, cepat atau lambat akan menyebabkan terjadinya disintegrasi dari negara nasional yang telah didirikan dengan perjuangan yang sangat panjang. Lebih dari itu, timbulnya konflik juga akan semakin menjauhkan perwujudan suatu masyarakat adil dan makmur yang menjadi motivasi utama dari perjuangan kemerdekaan yang berawal hampir satu abad yang lalu.

### **Etnik dan Etnisitas**

Etnik adalah suatu komunitas antropologis yang terdiri atas mereka yang merasa seketurunan dan lazimnya mempunyai sejarah, tradisi, dan kebudayaan yang sama dengan ciri-ciri khas yang umumnya berbeda dengan etnik lain. Mereka bertekad untuk memelihara jati diri serta identitas khasnya itu. Lazimnya, setiap etnik mempunyai suatu kampung

halaman tradisional (*homeland*) yang keberadaannya mempunyai akar sejarah yang amat kuat.<sup>4</sup> Secara sosiologis, kewargaan etnik pada dasarnya bukanlah bersifat *acquired status* tapi lebih bersifat *ascribed status*.<sup>5</sup> Yakni suatu atribut sosial yang melekat erat dengan diri pribadi seseorang karena asal muasalnya, baik secara fisik maupun secara sosial.

Pengalaman menunjukkan bahwa hal-hal yang bersifat abstrak dan universal, seperti agama, ideologi, atau filsafat politik, yang sesungguhnya berpotensi untuk membangun kehidupan nasional yang bersifat lintas etnik, bahkan bersifat supra etnik, dalam kehidupan nyata akan tetap menjadi satu dengan eksistensi suatu etnik, berikut segala varian lokalnya. Oleh karena itu, lebih dari sekedar atribut sosial, kewargaan etnik akan menjadi identitas pribadi yang dibawa seseorang sejak lahir sampai mati.

Sebagai komunitas antropologis, pada dasarnya etnik bersifat apolitis, dalam arti secara politik netral. Oleh karena itu mereka dapat hidup di bawah kekuasaan negara dan pemerintahan apapun juga. Dari segi historis, sejarah mereka bisa sudah sangat tua, bahkan jauh lebih tua dari negara atau kesadaran kebangsaan itu sendiri.<sup>6</sup> Sedangkan etnisitas, meskipun subjeknya sama, lebih berkenaan dengan dimensi politik dan yuridis dari eksistensi etnik tersebut. Hal ini memungkinkan secara teoritikal dapat terjadi bahwa meskipun secara *de facto* eksistensi sebuah etnik diakui, namun secara *de jure* keberadaan mereka tidak terlihat, baik

dalam sistem politik maupun sistem hukum. Hal ini sebagaimana dialami suku Kurdi yang *homeland*-nya terletak di perbatasan wilayah Iran dan Irak. Kedua negara yang sering bermusuhan tersebut merasa terancam dengan integritas wilayah dan keamanannya jika memberikan pengakuan formal terhadap suku ini. Oleh karena itu, tidak jarang mereka bekerja sama untuk menindas suku Kurdi tersebut.<sup>7</sup>

Suatu bangsa yang masyarakatnya bersifat multi etnik, mau tidak mau, etnisitas mempunyai implikasi yang mendasar dan luas dalam segala bidang, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam bidang sosial, masyarakat multi etnik menghadapi kenyataan identifikasi seseorang atas dasar etnis yang mengalir dalam dirinya. Identifikasi ini acap kali menggiring pada prasangka dan *stereotype* sosial. Di bidang ekonomi, persaingan untuk memperoleh bagian dari sumber daya ekonomi juga diwarnai oleh kesadaran tentang perbedaan etnik tersebut. Hal ini bisa dilihat dari persoalan yang muncul dalam bidang pertanian dan pertambangan yang terkait erat dengan masalah hak kepemilikan kolektif atas tanah yang kerap diwarnai dengan konflik horisontal antar etnik. Di bidang politik, kewargaan etnik sering berubah menjadi *liability* yang pada gilirannya berujung pada diskriminasi politik.

Dalam konteks kemajemukan etnik, hal yang juga perlu diamati adalah besarnya pengaruh interaksi antar budaya politik etnik yang cenderung elitis dan paternalistik. Budaya politik se-

perti ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Sebab ketika dibiarkan begitu saja bisa menjelma menjadi konflik etnis yang akut. Sejarah politik nasional Indonesia menunjukkan bagaimana pola budaya tersebut menjadi persoalan yang selalu menggelayuti perjalanan bangsa ini.

Budaya politik elitis dan paternalistik kerap diidentikkan dengan suku Jawa dan Madura, sedang budaya politik populis dan egalitarian disematkan pada suku luar Jawa. Pada gilirannya, identifikasi ini memicu timbulnya isu pusat dan daerah serta masalah Jawa dan luar Jawa. Dan, kita tahu, sampai saat ini, isu ini menjadi tema-tema standard dalam kehidupan politik Indonesia. Mulai dari aktivitas suprastruktur politik sampai kegiatan partai politik serta lembaga swadaya masyarakat yang berada pada tataran infrastruktur politik. Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh pada integritas dan komitmen nasional yang telah dirumuskan.

Masalah pelik ini tentunya sangat menyita perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah. Dan hanya tekad yang kuat serta suasana saling mempercayai di kalangan para pemimpin dan dibangun secara sadar serta diwujudkan dengan konsisten yang dapat dijadikan landasan untuk mengelola bangsa multi etnik ini. Proses perkembangan kesadaran kebangsaan dan pembentukan negara kebangsaan Republik Indonesia umumnya didasarkan atas asumsi bahwa kesadaran etnik harus ditinggalkan karena membangun potensi kerawanan

bahkan ancaman. Namun demikian, tidaklah mudah untuk melaksanakan doktrin berdasarkan asumsi seperti di atas. Tak jarang, warga etnik yang merasa jati diri serta eksistensinya terancam secara perlahan mengembangkan *self-defense mechanism* dari bentuk yang paling lunak seperti menjaga jarak dan memelihara perbedaan, sampai bentuk yang paling ekstrim dalam wujud gerakan separatis.<sup>8</sup>

Tentang kerumitan persoalan etnik dan etnisitas ini, Presiden Megawati membuat kesimpulan menarik:

Ringkasnya, secara teoritik mungkin dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya adalah hampir mustahil—bahkan merupakan suatu *mission impossible*—untuk membangun suatu bangsa baru yang andal dari demikian banyak etnik di Indonesia, yang mempunyai latar belakang yang beraneka ragam tersebut. Sebabnya antara lain, adalah sangat minimnya *collective memory* yang dapat dijadikan landasan filsafat politik, ideologi, serta kehendak bersama, yang demikian penting bagi terwujudnya suatu bangsa dan negara nasional. Masalah ini akan semakin sulit jika dalam sejarah interaksi antar-etnik yang panjang, pernah terjadi konflik—bahkan peperangan—di antara mereka, yang lazim akan terkristalisasi dalam *folklore* yang akan dikisahkan secara turun temurun.

Sejarah pembangunan bangsa Indonesia merupakan cermin yang

pas untuk mendeskripsikan kondisi di atas. Pada awal perumusan dasar bangsa, banyak perdebatan sengit muncul yang berkisar pada persoalan etnik dan etnisitas. Sampai akhirnya, diawali dari gerakan kebangsaan yang dimotori kaum terpelajar muda Indonesia pada abad ke-20. Mereka mengembangkan pemikiran dengan cakrawala yang luas dan bersifat supra-etnik dalam melihat postur tubuh bangsa Indonesia. Kemudian mereka menemukan, mengembangkan, serta mensosialisasikan wawasan kebangsaan yang tersebut kepada seluruh rakyat dan pengikutnya.

### **Pancasila Sebagai Pemersatu**

Sejarah nasional, secara empirik menunjukkan banyaknya tantangan mendasar yang dihadapi oleh para *nation and state builders* di Indonesia sejak awal abad ke-20. Pada satu sisi, mereka harus menjawab pertanyaan bagaimanakah caranya menghapuskan sisa pengaruh sistem kolonial dan imperial yang telah melembaga dalam sistem hukum dan harus diberlakukan dalam masa transisi tadi. Pada sisi yang lain, bagaimana caranya menumbuhkan solidaritas nasional dari demikian banyak etnik yang tersebar di seluruh daerah sehingga dapat menjadi fondasi bersama.

Mohammad Hatta, sebagai salah satu *founding fathers* bangsa ini, mengatakan bahwa langkah awal yang diambil dalam dasawarsa 1920-an adalah dengan membangun suatu prinsip perjuangan kemerdekaan, dengan cara membalikkan seluruh visi

dan strategi yang pernah digunakan oleh kaum kolonialis dan imperialis dari benua Eropa. Kemajemukan etnik secara sadar ditolak serta ditinggalkan karena ternyata sangat rentan terhadap adu domba pihak luar, dan diganti dengan semangat kebangsaan yang dipahami secara amat linier. Strategi *divide et impera* dihadapi dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam arti yang hampir amat monolitik.<sup>9</sup>

Tentang perilaku kolonial yang menggunakan sentimen etnis untuk melanggengkan kolonialismenya, Presiden Megawati menyajikan paparan menarik:

selain berusaha mencatat dan meneliti secara mendalam karakteristik etnik-etnik yang ada, mereka juga “menghasilkan” strategi kolonial yang sangat ampuh untuk memecah belah dan mengadudomba berbagai etnik Indonesia. Inilah yang selama ini kami kenal sebagai *divide et impera*.

Strategi ini dilanjutkan oleh bangsa Belanda – yang secara bertahap dan berlanjut selama ratusan tahun menjadi “pewaris” kolonialisme dan imperialisme Portugis dan Spanyol di Indonesia -- yang bukan saja mampu meningkatkannya ke taraf yang lebih canggih, dengan dukungan ilmu etnologi serta ilmu hukum adat, tetapi juga menyusun suatu tatanan kenegaraan yang sepenuhnya didasarkan pada perbedaan ras, etnik, dan agama.

Keseluruhan sistem kenegaraan, sistem pemerintahan

dan sistem hukum kolonial yang dimasa lalu diterapkan di Indonesia, didasarkan pada konsep rasialis ini. Sistem tersebut membedakan secara tajam antara orang Eropa, orang Timur Asing, dan kaum Bumiputera. Kombinasi antara ilmu etnologi, strategi *divide et impera* dan sistem kenegaraan yang sangat diskriminatif tersebut benar-benar ampuh, efektif, dan efisien untuk menguasai seluruh etnik di Indonesia dalam waktu yang panjang.

"Warisan" sistem kolonial dan imperial tersebut memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara di Indonesia. Sampai saat inipun, masih banyak sisa-sisa kebijakan, strategi, dan sistem tersebut yang harus kami bersihkan dari sistem nasional yang sedang kami bangun. Sekarang, disamping hukum transitioir yang mengharuskan diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang lama sepanjang belum dapat disusun peraturan perundang-undangan yang baru, kami juga menghadapi kemajemukan etnik dari bangsa kami. Semua itu merupakan persoalan yang tidak ringan, khususnya dalam membangun konsensus-konsensus nasional yang diperlukan untuk membangun sistem hukum nasional yang mempunyai legitimasi sosial yang kuat.

Sedangkan Soekarno menggenapkan dan memberi isi terhadap rintisan generasi sezamannya itu, dengan mencari dan mengembangkan suatu kerangka filsafat politik yang lebih mendasar, dengan menampilkan persamaan nilai-nilai kultural yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang demikian majemuk itu. Kerangka filsafat ini yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila yang terdiri atas lima sila utama yakni: pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; pengakuan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai kerangka filsafat politik, Pancasila pernah menuai pertanyaan serius. Yakni apakah pemikiran tentang Pancasila memang sudah cukup mendalam dan cukup berkembang secara koheren dan konsisten sehingga layak untuk diberi predikat filsafat politik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Soekarno sebagai penggali Pancasila belum pernah berkesempatan menuangkan pemikirannya secara filosofis meski setelah tahun 1945 itu ia pernah dua kali mengulas lebih lanjut pemikirannya dalam kursus resmi mengenai Pancasila.<sup>10</sup> Namun 'kerentanan' pemikiran Soekarno pada pengaruh situasi sesaat tersebut tidak mengecilkkan makna sumbangannya terhadap eksistensi negara Republik Indonesia. Sumbangannya yang akan bersifat abadi terhadap Indonesia adalah anjurannya yang diterima

dengan gegap gempita pada 1 Juni 1945 kepada BPUPKI untuk menerima lima sila tersebut sebagai dasar negara. Juga kepemimpinannya dalam merumuskan Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakannya pada 17 Agustus 1945.<sup>11</sup>

Pancasila ini dirumuskan dengan harapan mampu mewadahi semangat religiusitas dan humanisme yang terdapat dalam semua agama. Juga menjadi tempat yang kukuh bagi tekad untuk bersatu dengan tetap menghormati keragaman budaya politik etnik yang egalitarian dan paternalistik yang selanjutnya dapat diarahkan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini, Pancasila merupakan kontrak sosial nasional antara pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Upaya yang dilakukan *founding fathers* ini tentunya sangat berharga. Mengingat, bagaimanapun juga, tentunya bukan hal yang gampang untuk menggali dan merumuskan landasan filsafat yang tepat bagi bangsa dengan masyarakat majemuk. Apalagi menumbuhkan sistem kenegaraan, sistem pemerintahan, serta sistem politik yang andal dan sesuai dengan landasan filsafat tadi. Merumuskan dan mengkristalisasikan landasan filsafat politik dari sistem nilai yang dianut pada dasarnya merupakan *kegiatan teoritisasi* dari fakta empirik. Sedangkan menumbuhkan sistem kenegaraan, sistem pemerintahan serta sistem politik yang sesuai dengan kemajemukan ma-

sarakat merupakan kegiatan institusional politik yang mencakup masalah kepemimpinan serta masalah administrasi dan manajemen pemerintahan yang terkait dengannya.

Dalam perkembangannya dewasa ini, agaknya sila-sila Pancasila perlu dipahami sebagai lima aksioma politik yang diterima sebagai dalil yang tidak memerlukan rincian lebih lanjut. Yang mungkin masih diperlukan adalah mencari kerangka pemikiran dasar yang dapat memberikan makna yang lebih utuh kepada lima aksioma politik sehingga dapat dipahami secara komprehensif, bukan sebagai lima konsep yang terlepas-lepas dan tidak ada kaitannya satu sama lain.

Pada aras ini, maka esensi Pancasila adalah sebagai aksioma politik nasionalisme Indonesia. Nasionalisme dalam konteks ini bukanlah suatu filsafat dalam artian yang lazim dipahami. Nasionalisme adalah suatu semangat, suatu tekad, dan suatu aksi politik, suatu *das sollen*. Sejatinya Pancasila adalah nasionalisme, yaitu faham yang berpendirian bahwa semua orang yang berkeinginan membentuk masa depan bersama di bawah lindungan suatu negara tanpa membedakan suku, ras, agama, ataupun golongan.<sup>12</sup> Pidato Presiden Megawati memberi catatan tersendiri tentang lima sila kita itu:

Di dalamnya bukan saja telah dapat diwadahi semangat religiusitas dan humanisme yang terdapat dalam semua agama yang dianut rakyat Indonesia, tetapi juga ada

tempat yang kukuh bagi tekad untuk bersatu, dengan tetap menghormati keragaman budaya politik etnik yang egalitarian dan paternalistik, yang selanjutnya dapat diarahkan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima dasar yang disambut secara riuh rendah itulah yang sesungguhnya merupakan kontrak politik nasional kami, yang kemudian dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Menuju Negara Multi Etnik Modern**

Meski demikian, pada tingkat praksis, etnik dan etnisitas selalu berpotensi menjadi konflik laten yang mesti dipikirkan secara serius. Begitu rumitnya persoalan etnik dan etnisitas yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, maka, mau tidak mau bangsa ini dihadapkan pada masalah bagaimana manata (kembali) bangunan kebangsaan ke depan. Yakni sebuah negara multietnik<sup>13</sup> modern yang mampu mengatasi serta mengelola kemajemukan etnik dan etnisitas dengan adil dan sejahtera. Dalam konteks ini, gerakan reformasi 1998 merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk menata dan mendaur ulang kembali kebangsaan Indonesia. Bukan hanya merenungkan kembali sejarah nasional di masa lampau tapi juga untuk bersepakat dan membicarakan kembali secara mendasar pola kehidupan nasional untuk masa mendatang. Inilah yang menjadi

salah satu sebab mengapa Indonesia terlihat 'lamban' dalam menangani krisis multidimensi dan krisis ekonomi yang melilit bangsa.

Sebagai realisasi dari upaya menuju negara multietnik modern ini, setelah melalui proses dan mekanisme yang ditentukan, dasar-dasar konsensus nasional yang baru mengenai tatanan masa depan Indonesia sudah dapat disepakati melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Filsafat politik dan tatanan kenegaraan yang dirancang para pendiri negara dipandang masih tetap relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Karenanya tetap dipertahankan dengan mengoreksi dan menyempurnakan bagian-bagian yang selama ini dipandang rentan disalahgunakan.

Pancasila yang selama ini lebih diperlakukan sekedar sebagai filsafat dan ideologi belaka mulai dijabarkan secara yuridis konstitusional. Di antaranya dengan mencantumkan lebih banyak pasal-pasal hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi ini selanjutnya dijadikan rujukan bagi penyusunan berbagai undang-undang organik yang memberi tempat bagi kemajemukan masyarakat Indonesia dari segi etnik.

Tatanan negara kesatuan yang selama ini dilaksanakan secara sentralisasi telah dibenahi secara mendasar. Kekuasaan pemerintah pusat, khususnya ke-

kuasaan presiden telah banyak dikurangi. Aspirasi dan kepentingan daerah-daerah yang selama ini ter(di)abaikan mendapat wadahnya yang tepat dengan segera dibentuknya lembaga negara yang baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selanjutnya, daerah-daerah otonom, baik propinsi, kabupaten, maupun kota, mendapat tugas dan wewenang yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tugas dan wewenang ini diiringi dengan kewenangan *budgeter* untuk memanfaatkan sebagian besar sumber daya ekonomi yang terdapat di daerah yang bersangkutan.

Namun demikian, tatanan otonomi baru ini ternyata juga menimbulkan persoalan baru. Yakni munculnya isu kesenjangan menyolok antara daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam dengan daerah-daerah yang miskin sumber daya alam. Di samping itu, muncul juga gejala penyalahgunaan wewenang oleh politisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mempunyai kekuasaan besar untuk menentukan anggaran DPRD-nya sendiri. Sistem pemerintahan presidensiil juga mendapatkan pembenahan kembali secara mendasar. Di antaranya adalah pemilihan presiden secara langsung yang mulai dilaksanakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Setelah sebelumnya presiden dipilih secara tidak langsung melalui ba-

dan perwakilan. Walaupun secara konstitusional pemilihan secara tidak langsung juga sah, pengalaman lima tahun terakhir menunjukkan bahwa presiden yang terpilih secara formal melalui mekanisme tersebut tidak memperoleh legitimasi sosial dan politik secara efektif. Khususnya bila presiden tidak berasal dari atau tidak didukung partai politik pemenang Pemilu.

Dari segi pluralitas etnik para pemilih, pemilihan presiden secara langsung sangat menarik karena, mau tidak mau, untuk memperoleh legitimasi politik, secara pribadi, seorang calon presiden harus didukung oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Meskipun partai politik yang mencalonkannya belum tentu memiliki akar yang kuat di daerah Indonesia yang sangat luas itu.

Konsep negara multietnik modern ini diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Juga mampu mengelola kemajemukan etnik dan etnisitas yang sarat muatan konflik dalam bingkai keutuhan bangsa ke depan. Namun, betapapun juga, lambat laun konsep ini segera mendapat ujian dan tantangan yang berarti. Apakah konsep ini cukup ampuh untuk manahan gempuran persoalan etnik dan etnisitas yang mewujud dalam segala bidang kehidupan berbangsa atau justru *collaps* di tengah jalan. Karena itu, kesadaran dari semua pihak sangat dibutuhkan guna mendorong terealisasinya negara multietnik modern ini. Sehingga kesejahteraan sosial dalam kemajemukan sebagaimana

diidamkan selama ini dapat tercapai. Semoga.

### Catatan Akhir

1. Data terakhir dari Ditjen Kebudayaan Depdikbud, 1996.
2. Dr. Saafroedin Bahar, Menjernihkan Posisi Etnik dalam Negara Nasional: Sebuah "Pekerjaan Rumah" Kita Dewasa Ini, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta: 1999, hal. 5.
3. Semangat kesukuan ini sering disebut dengan etnonasionalisme atau nasionalisme etnisitas. Yakni nasionalisme yang bertumpu pada etnisitas. Semangat tersebut menanggalkan identitas kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Sebaliknya, lebih menonjolkan identitas suku bangsa atau etnis sebagai alat perekat.
4. *Ibid.*, hal. 7.
5. *It is not an acquired status but an ascribed status, as sociologist would say.* Selanjutnya lihat tulisan Saafroedin Bahar berjudul 'Ethnics, ethnicity, Nation, and the Nation State: A "Tolem Pole" Hypothesis' yang dipresentasikan pada Diklat SESPARLU, Departemen Hubungan Luar Negeri pada 1 November 2001 dan 2 Agustus 2002. tulisan ini direvisi pada tanggal 5 Desember 2002.
6. Dr. Saafroedin Bahar, *Menjernihkan Posisi Etnik dalam Negara Nasional: Sebuah "Pekerjaan Rumah" Kita Dewasa Ini, op. cit.*, hal. 7
8. *Ibid.*, hal. 8.
9. *Ibid.*, hal. 9.
10. Visi kesejarahan kaum nasionalis gelombang pertama bersifat linier, eksklusif, dan sentripetal dalam arti Negara kebangsaan hanya dapat dibentuk dengan menanggalkan etnisitas serta identitas kedaerahan lainnya dengan membentuk suatu kekuatan sentral yang dominan. Konsekuensi dari visi seperti ini adalah tidak ada tempat bagi keluhan sosial ekonomi serta keluhan sosial budaya etnik. Setiap keluhan seperti di atas, secara otomatis, akan dinilai sebagai suatu langkah mundur. Bila berlanjut, bahkan akan dinilai sebagai aksi subversiv. Etnik dan etnisitas dipandang

sebagai "dosa warisan". *Ibid.*, hal. 16.

11. Baca tulisan Dr. Saafroedin Bahar berjudul Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Sosial Politik sebagai materi diskusi Pelatihan Dosen Nasional Pendidikan dan Filsafat Pancasila di Yogyakarta tanggal 18 September 2001. edisi disempurnakan, Surabaya: 10 Agustus 2002. Direvisi untuk penyajian di Yogyakarta 10 September 2002.
12. *Ibid.*,
13. *Ibid.*,
14. Dalam hal ini, Indonesia memiliki persamaan dengan Cina sebagai sebuah Negara kesatuan multietnik. Di Cina, persatuan di kalangan suku bangsa berarti bahwa terlepas dari berapapun banyaknya jumlah suku bangsa atau taraf perkembangan ekonomi sosial, atau perbedaan dalam cara hidup, kebiasaan, dan agama, semua kelompok etnik menikmati hak-hak yang sama dan menjalankan kewajiban yang sama dalam seluruh aspek kehidupan politik dan sosial sesuai dengan hukum. dan untuk mencapai kesatuan seperti itu, berbagai suku bangsa diminta untuk memelihara dan mengembangkan kesatuan di kalangan mereka sendiri serta dalam setiap suku bangsa itu sendiri. Setiap orang dari berbagai suku bangsa juga diminta untuk bergabung bersama-sama memajukan perkembangan dan kemakmuran negara, menentang pemisahan di antara berbagai suku dan memelihara persatuan Negara. Selanjutnya, baca Xiao Zhengrong, 'Cina: Negara Kesatuan Multietnik' dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (editor), *Kontroversi Negara Federal, Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*, Bandung, Mizan: 2002.

### Daftar Pustaka

- Fredrick Barth, *Kelompok Etnik dan Batasannya*, Terj. Nuning L. Susilo, Jakarta, UI Press, 1988.
- Geertz, Hilared, (*Pengantar TO Ithrom*) *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, FIS-UI, 1981.

- Ikrar Nusa Bakti dan Riza Sihbudi, *Kontroversi Negara Federal, Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*, Bandung, Mizan, 2002.
- Korten, D. C. dan Syahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Megawati Soekarnoputri, "Menuju Suatu Negara Multi-Etnik Modern yang Lebih Adil dan Sejahtera", Pidato penerimaan Doktor Honoris Causa di Universitas Moscow, 22 April 2003.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta, UGM, 1981.
- Republik Indonesia, *Peta Suku Bangsa Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Sariyun Yugo, *Konflik Sosial di Sekitar LNG*, (Wawasan, No. 4 Tahun II/1980)
- Saafroedin Bahar, Dr, *Menjernihkan Posisi Etnik Dalam Negara Nasional: Sebuah "Pekerjaan Rumah" Kita Dewasa Ini*, Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1999.
- , *Ethnics, Ethnicity, Nation, and The Nation State*, Jakarta, Departemen Luar Negeri, 2001.
- , *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Bidang Sosial Politik*, Yogyakarta, 2001.
- Suparlan, Parsudi, *Perubahan Lingkungan Sosial Karena Pembangunan (Dalam Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, 1981.

Ibnul-Mu'taz berkata:

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَاغٌ لِّغَايَةٍ ۖ فَيَا مَاءَ إِلَى غَوِيٍّ وَإِمَاءَ إِلَى رُشْدٍ

Ingatlah, sesungguhnya dunia itu tiada lain hanyalah bekal untuk mencapai tujuan, baik kepada jalan bengkok maupun kepada jalan yang lurus.

Ia berkata:

وَمَا الْعَيْشُ إِلَّا مَدَّةٌ سَوْفَ تَنْقُضُ ۖ وَمَا الْمَالُ إِلَّا هَالِكٌ وَابْنُ هَالِكٍ

Kehidupan itu hanyalah sebentar dan kelak akan berakhir, dan harta itu hanyalah sesuatu yang akan musnah dan musnah.